



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

**PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS
SELATAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini menyajikan gambaran capaian kinerja Bapperida selama Tahun Anggaran 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Teluk Dalam, 12 Maret 2026

Kepala Bapperida Kabupaten Nias Selatan,



ABDIEL SONASA AMAZIHONO, SSTP, .M.Ec.Dev
Pembina Tk.I
NIP. 19830826 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, riset, dan inovasi daerah.

Pada Tahun 2025 Bapperida Kabupaten Nias Selatan menetapkan **2 sasaran strategis** yang diukur melalui **3 indikator kinerja**. Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan.

Ringkasan capaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22.95	22.73	99%
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12.55	14.1	112%
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	40	44.22	111%

Selain capaian kinerja tersebut, pengelolaan anggaran juga menunjukkan hasil yang baik. Dari total anggaran sebesar **Rp 2.192.945.702,-** terealisasi sebesar **Rp 2.000.648.115 atau 91,23%**, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Secara umum, kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik**, yang tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana	9
1.6 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Golongan .	7
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Nias Berdasarkan Laporan Aset Per 31 Desember 2025.....	10
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029	14
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025	16
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	36
Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025	39
Tabel 3. 4 Kebutuhan dan Kondisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025	48
Tabel 3. 5 Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2025	49
Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan	9
Grafik 3. 1 Tren Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 2022–2025.....	40
Grafik 3. 2 Tren Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja 2022–2025	41
Grafik 3. 3 Tren Indeks Inovasi Daerah 2022–2025.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk merencanakan kinerja secara terukur, melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, serta melaporkan capaian kinerjanya secara transparan kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan pelaksanaan pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki arti penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena merupakan tahun transisi antara

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Tahun 2021–2026 dengan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan pada tanggal 5 November 2025. Kondisi ini menuntut adanya kesinambungan antara arah kebijakan pembangunan sebelumnya dengan arah kebijakan pembangunan yang baru, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menjadi penting sebagai media untuk menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan perencanaan pembangunan daerah pada periode selanjutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapperida memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara struktural, Bapperida berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan ini menempatkan Bapperida sebagai perangkat daerah yang berperan dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memastikan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kedudukan Bapperida diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan

1.2.2 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian telah di ubah melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa Bapperida melalui Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bapperida Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta fungsi riset dan inovasi daerah;

- f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi terdiri dari :

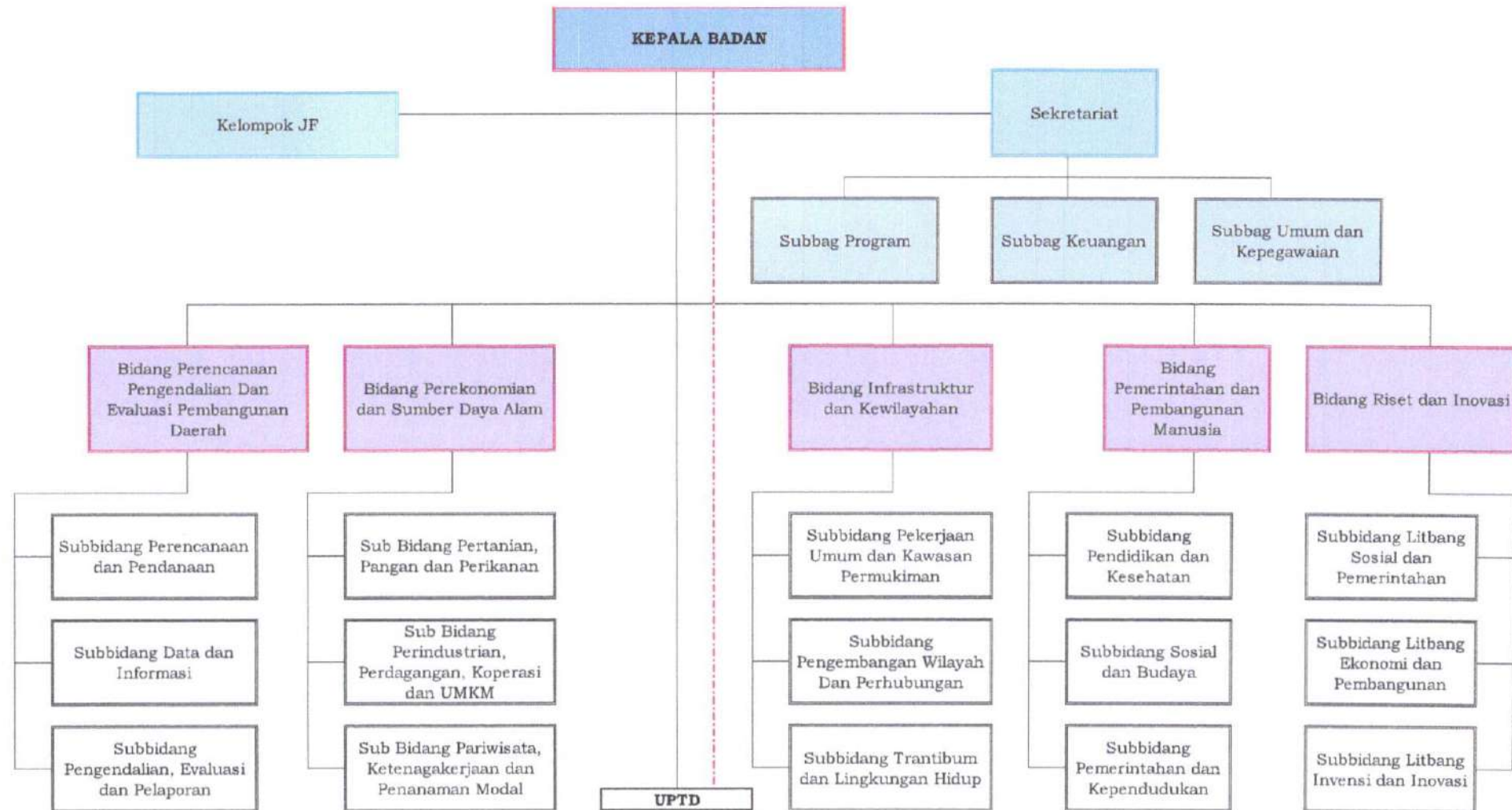
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 3. Sub Bidang Pariwisata, Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Dan Perhubungan;
 - 3. Sub Bidang Trantibum dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
- g. Bidang Riset dan Inovasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Litbang Invensi dan Inovasi.

h. Unit Pelaksana Teknis;

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari uraian susunan organisasi diatas maka bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan. Ketersediaan pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas sangat menentukan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah, serta kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pada Tahun 2025, jumlah sumber daya manusia pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 7 orang tenaga harian lepas. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat berdasarkan golongan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan golongan menunjukkan struktur kepangkatan ASN yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Pegawai pada golongan III mendominasi jumlah ASN karena sebagian besar merupakan pelaksana teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah, sedangkan pegawai golongan IV umumnya menempati jabatan struktural yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan. Komposisi pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Komposisi Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan														
		IV					III					II				
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml
1	Kepala	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-	1	2
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan	1	-	-	-	1	2	-	3	1	6	-	-	-	-	-
4	Bidang Perekonomian dan	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	-	-	-	1
5	Bidang Infrastruktur dan	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-
6	Bidang Pemerintahan dan	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	-	-	-	-	-
7	Bidang Riset dan In	-	1	-	-	1	1	-	1	3	5	-	-	-	-	-
Total		2	3	-	-	5	5	-	10	13	28	-	-	-	2	3

Komposisi pegawai berdasarkan golongan tersebut menunjukkan bahwa struktur sumber daya manusia pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan relatif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Namun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapperida Kab.Nias Selatan Tahun 2024

demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada aspek kompetensi perencanaan dan penguasaan teknologi informasi, tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi ASN pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dibandingkan pegawai perempuan. Dari total 38 orang ASN, sebanyak 29 orang atau sekitar 76% merupakan pegawai laki-laki, sedangkan 9 orang atau sekitar 24% merupakan pegawai Perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	4	3	7
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	1	7
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	1	6
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4	1	5
6	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	2	6
7	Bidang Riset dan Inovasi	5	1	6
TOTAL		29	9	38

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2). Dari total 38 orang ASN, sebanyak 24 orang atau sekitar 63% berpendidikan S1, 9 orang atau sekitar 24% berpendidikan S2, 1 orang atau sekitar 3% berpendidikan D3, serta 4 orang atau sekitar 10% berpendidikan SLTA/SMK.

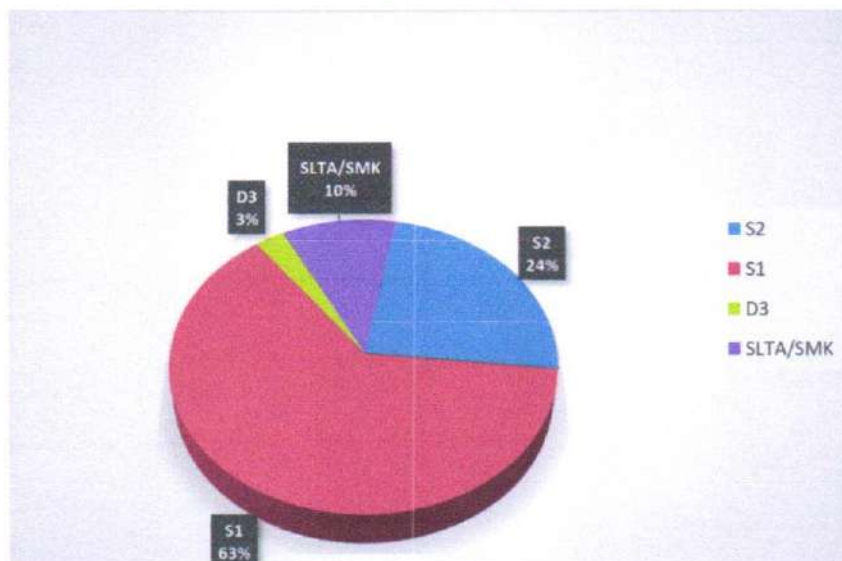
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1	Kepala	-	1	-		-			-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2		1			3	-	-	7
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	2	4		-			-	-	-	6
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	6		-			-	-	-	6
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	2	2		-			1	-	-	5
6	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	5		-			-	-	-	6
7	Bidang Riset dan Inovasi	-	2	5		-			-	-	-	7
TOTAL		-	9	24		1			4	-	-	38

Sebaran tingkat pendidikan pegawai tersebut juga dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan



1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengolahan data pembangunan, serta pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan data Barang Milik Daerah, Bapperida Kabupaten Nias Selatan memiliki 210 unit sarana dan prasarana, yang terdiri dari 59 unit peralatan komputer, 7 unit alat angkutan, 141 unit peralatan kantor dan rumah tangga, serta

3 unit peralatan studio, komunikasi dan pemancar. Ketersediaan peralatan komputer tersebut pada prinsipnya telah mendukung pelaksanaan tugas pegawai dalam pengolahan data, penyusunan dokumen perencanaan, serta penyelenggaraan administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi.

Jika dibandingkan dengan jumlah 38 orang ASN, ketersediaan perangkat komputer pada Bapperida secara umum relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, pemeliharaan serta peningkatan kualitas sarana prasarana, khususnya perangkat teknologi informasi dan fasilitas pendukung kerja, tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta mendukung penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih terpadu dan berbasis data.

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Bapperida Kabupaten Nias Berdasarkan Laporan Aset Per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	210
	KOMPUTER	59
	- P.C Unit	12
	- Lap Top	18
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	22
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6
	- Server	1
	ALAT ANGKUTAN	7
	- Sport Utility Vehicle (SUV)	1
	- Sepeda Motor	6
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	141
	- Mesin Penghitung Uang	1
	- Lemari Besi/Metal	11
	- Lemari Kayu	24
	- Brandkas	1
	- Laci Box	7
	- CCTV - Camera Control Television System	1
	- Alat Penghancur Kertas	4
	- LCD Projector/Infocus	5
	- Meja Kerja Kayu	13
	- Meja Rapat	14
	- Meja 1/2 Biro	15
	- Sofa	1
	- A.C. Split	16
	- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	- Kipas Angin	5
	- Amplifier	2
	- Loudspeaker	4
	- Sound System	1
	- Mimbar/Podium	2
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3
	- Audio Mixing Portable	1
	- Power Amplifier	1
	- Genset	1
	Total	210

1.6 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah, Bapperida Kabupaten Nias Selatan dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang terus berkembang. Perubahan lingkungan strategis, perkembangan kebijakan pembangunan nasional, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi karena berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap kondisi internal organisasi, perkembangan lingkungan strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka isu strategis yang menjadi perhatian utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan integrasi dan konsistensi antara sistem perencanaan dan penganggaran daerah agar program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perencana dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Penguatan sistem perencanaan pembangunan berbasis data dan informasi terpadu guna mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam rangka meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan antara perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6. Penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan regulasi nasional yang berpengaruh terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga diperlukan kemampuan adaptasi kebijakan secara cepat dan tepat.
7. Keterbatasan dukungan anggaran dalam pengembangan inovasi daerah dan sistem perencanaan berbasis teknologi informasi yang masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kualitas serta pemerataan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih aspiratif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Rencana Strategis (Renstra) memuat arah kebijakan pembangunan organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Renstra ini menjadi pedoman bagi Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi daerah.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena menjadi tahun transisi antara pelaksanaan Renstra perangkat daerah Tahun 2021–2026 dengan Renstra perangkat daerah Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan tetap memperhatikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap visi dan misi pembangunan daerah pada periode kepemimpinan yang baru.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, Berdaya Saing, Inovatif, Berkelanjutan dan Lestari Berkeadaban”**, Bapperida Kabupaten Nias Selatan berperan strategis sebagai unsur perencana pembangunan daerah yang bertugas memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Visi pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;

2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat;
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Nias Selatan yang meliputi perencanaan pembangunan daerah, riset, dan inovasi daerah, maka Bapperida memiliki kontribusi utama dalam mendukung pelaksanaan **Misi Kelima**, yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat.”***

Dukungan terhadap misi tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; peningkatan kualitas data dan analisis kebijakan pembangunan daerah; serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan peran tersebut, Bapperida Kabupaten Nias Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Tahun 2025 – 2029 yaitu

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 - 2029

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	22.95	24.36	25.77	27.18	28.59	30
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	12.55	13.95	15.35	16.75	18.15	19.55

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Poin	40	42	46	48	55	65

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22.95 Poin
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12.55 Poin
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	40.00 Poin

Untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), diperlukan program-program yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi serta strategi organisasi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah program dan anggaran Bapperida sebelum dan setelah perubahan dalam mendukung pencapaian IKU 2025 :

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,675,038,900	1,047,527,546	(627,511,354)	DAU
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825,906,000	570,406,196	(255,499,804)	DAU
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	718,778,010	421,919,810	(296,858,200)	DAU
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	290,000,000	153,092,150	(136,907,850)	DAU
Jumlah		3,509,722,910	2,192,945,702	(1,316,777,208)	

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Bapperida Kabupaten Nias Selatan juga telah menyusun rencana aksi yang lebih detail, yang dibagi setiap triwulan untuk memastikan target sasaran dapat dicapai dengan optimal, serta organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang dapat di lihat pada *lampiran* dokumen ini.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai target pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Rencana kinerja tahunan menjadi bagian integral dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	1,830,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	83 %	1,351,271,196
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	13 Dok	52,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	62 Poin	33,039,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	6,328,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5,813,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5,642,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3,750,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3,750,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	3,781,500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	3,975,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29 Dok	156,960,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96 %	147,901,500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bln	126,960,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org/Bln	129,360,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5,379,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7,500,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	3,776,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	5,676,000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	7,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	3,710,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	15,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase yang telah tercatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah	100 %	7,627,250
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3,942,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	3,685,250

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30 Org	130,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Fasilitasi dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi	100 %	91,460,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	91,460,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	956,270,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat efektivitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	799,992,946
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12,182,310
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	97,326,301
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	180,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	77,313,335

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	65,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	45,005,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	6,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Lap	573,170,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Lap	548,166,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 Unit	23,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai perencanaan	0 %	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	23,500,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	171,050,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	100 %	180,570,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520 Lap	6,050,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	423 Lap	4,230,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	161,340,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 Unit	324,720,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis	100 %	90,680,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	68,620,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	65,420,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	56,100,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	25,260,000
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PERENCANAAN				PERENCANAAN			
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	535,000,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	94 %	651,922,599
						Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 %	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	375,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat ketepatan waktu dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	576,317,403
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	10,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	114,018,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	10,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	4,999,000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	60,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	64,686,000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36 BA	27,308,000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	100,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	49,358,000
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	461 Usulan	15,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	400 Usulan	39,648,000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	150,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	276,300,403
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	85,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data pembangunan yang tersedia	100 %	33,676,500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	10,000,000	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	5,001,000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	50,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	17,674,500
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	25,000,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	11,001,000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	6 Dok	75,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90 %	41,928,696
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	35,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	24,135,696
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Lap	40,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Lap	17,793,000
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	100 %	720,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	526,402,729

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	100 %			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	44 Dok	240,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	171,885,900
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	6,803,900
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63 Lap	14,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	63 Lap	4,981,400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	20 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	63 Lap	4,984,650
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	38,770,750
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	63 Lap	13,947,000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	63 Lap	12,451,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	24 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	63 Lap	75,947,200
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	42 Dok	240,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	183,707,829
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	11,122,000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	20 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	63 Lap	17,257,500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	20 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	63 Lap	10,792,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	63 Lap	81,712,000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	11,123,000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	22 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	63 Lap	17,256,500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	22 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	63 Lap	10,779,500
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	22 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	63 Lap	23,665,329
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	40 Dok	240,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	170,809,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	6,104,600
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	16 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	63 Lap	21,429,100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	16 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	63 Lap	5,215,400
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	63 Lap	112,325,500
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dok	30,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dok	3,167,750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	24 Lap	40,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	63 Lap	14,655,400
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	24 Lap	20,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	63 Lap	3,456,200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	24 Lap	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	63 Lap	4,455,050
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	10 %	415,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	100 %	183,972,150

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dok	330,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Lap	140,805,500
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lap	55,000,000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lap	15,000,000
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Lap	275,000,000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Lap	125,805,500
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dok	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dok	20,963,150
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	45,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	20,963,150
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Lap	40,000,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase unit kerja yang menerapkan inovasi teknologi dari total unit yang ada	100 %	22,203,500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja 2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan Renja 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	25,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	14,420,250
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	15,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	7,783,250
TOTAL				3,500,000,000				2,713,568,674

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran antara Renja sebelum perubahan dan setelah perubahan pada Tahun Anggaran 2025. Perubahan pagu tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain penyesuaian pagu anggaran, terdapat pula perubahan pada beberapa indikator program dan kegiatan. Perubahan indikator tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dimaksudkan agar indikator kinerja program dan kegiatan lebih selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran serta perubahan indikator program dan kegiatan tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tetap dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui sistem pelaporan kinerja yang disusun secara transparan, objektif, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah, akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah, kegiatan penelitian, serta pengembangan inovasi kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada periode pelaporan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Penilaian terhadap capaian kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada kategori tingkat keberhasilan tertentu. Kategori ini digunakan untuk menentukan posisi capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Bapperida Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Bapperida Kabupaten Nias Selatan. Hasil pengukuran kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22.95	22.73	99%
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12.55	14.1	112%
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	40	44.22	111%

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bapperida Kabupaten Nias Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah.

Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja yang merupakan bagian dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

a. Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Target nilai indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **22,95**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **22,73** sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **99%**.

Formula pengukuran indikator ini adalah:

Nilai = (Skor tiap sub komponen perencanaan × Bobot)

Sub Komponen : Keberadaan 20% + Kualitas 30% + Pemanfaatan 50%
= 100%

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, nilai komponen perencanaan kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari **21,54 menjadi 22,73**. Meskipun demikian, capaian indikator ini masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah sudah berjalan dengan baik namun masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam aspek penyelarasan indikator kinerja, penetapan target yang lebih menantang, serta penguatan keterkaitan antara rencana aksi dan sasaran strategis.

b. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **12,55**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **14,10**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **112%**.

Formula pengukuran indikator ini adalah:

Nilai = (Skor tiap sub komponen pengukuran × Bobot)

Sub Komponen : Keberadaan 20% + Kualitas 30% + Pemanfaatan 50%
= 100%

Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah mengalami peningkatan, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi pemantauan kinerja dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi rencana aksi secara berkala. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti penyempurnaan definisi operasional indikator kinerja serta peningkatan validitas data capaian kinerja

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator **Indeks Inovasi Daerah (IID)**. Target indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **40**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **44,22**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **111%**.

Formula pengukuran indikator ini adalah:

$$\text{IID} = (\Sigma (\text{Skor Inovasi} \times \text{Bobot Inovasi})) / \text{Jumlah Inovasi}$$

Indeks Inovasi Daerah merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat inovasi pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Capaian indikator ini yang melampaui target menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Bapperida telah mampu mendorong pengembangan inovasi daerah secara lebih optimal. Hal ini mengindikasikan meningkatnya upaya pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Selain membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, analisis kinerja juga dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan (trend) peningkatan atau penurunan kinerja organisasi serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

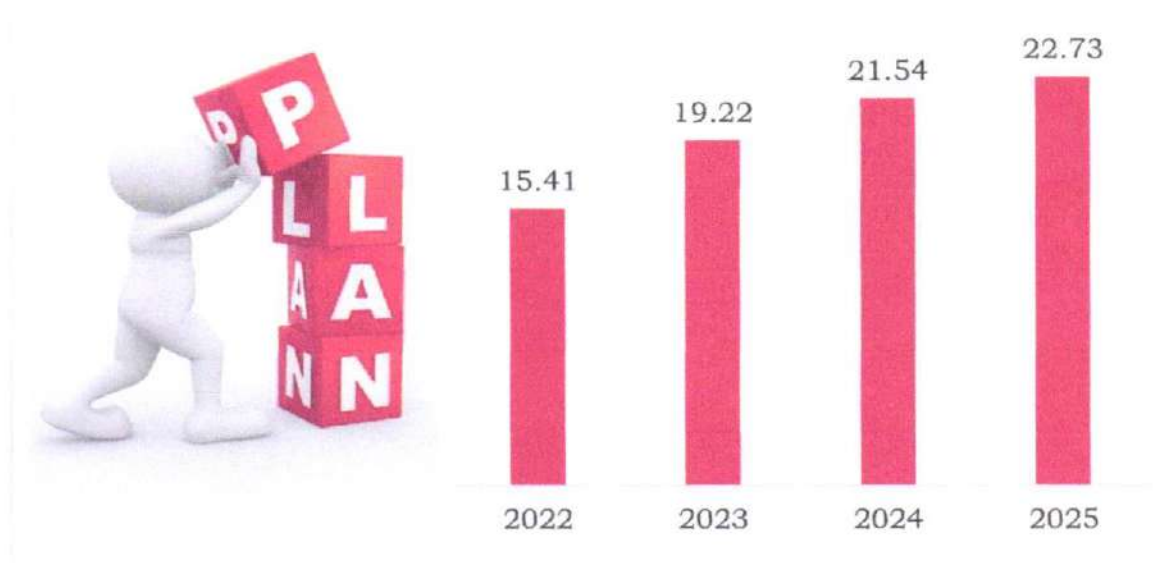
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	15.41	19.22	21.54	22.73
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	6.41	9.91	11.15	14.10
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	n/a	37.08	35.01	44.22

1. Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Realisasi nilai AKIP komponen perencanaan kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai yang dicapai sebesar **15,4**, kemudian meningkat menjadi **19,2** pada tahun 2023, selanjutnya meningkat kembali menjadi **21,5** pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mencapai **22,7**.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, serta peningkatan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, capaian tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan pencapaian target kinerja, tetapi juga menggambarkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan kinerja pemerintah daerah.

Grafik 3. 1 Tren Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 2022–2025



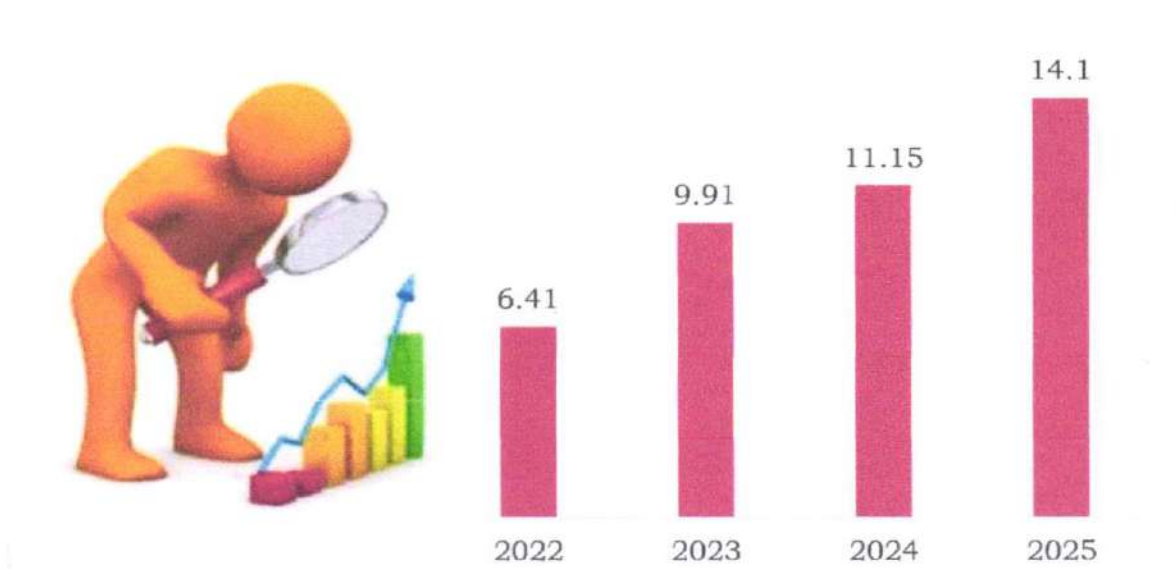
2. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Realisasi nilai AKIP komponen pengukuran kinerja juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 nilai indikator ini sebesar **6,41**, kemudian meningkat menjadi **9,91** pada tahun 2023, selanjutnya meningkat menjadi **11,2** pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mencapai **14,1**.

Kenaikan nilai ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh semakin baiknya proses pengumpulan data kinerja, pencatatan capaian kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tren peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan SAKIP di lingkungan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pengukuran kinerja organisasi.

Grafik 3. 2 Tren Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja 2022–2025



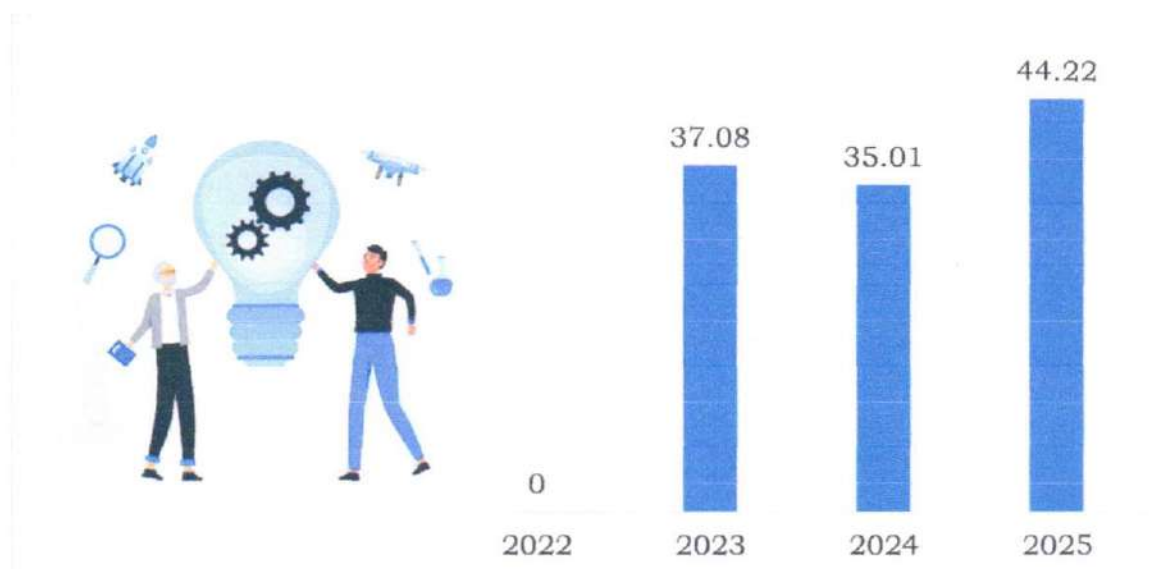
3. Indeks Inovasi Daerah

Realisasi Indeks Inovasi Daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada tahun 2022 indikator ini belum memiliki nilai (n/a). Hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya dokumentasi inovasi daerah yang tersusun secara sistematis dan terstandar sesuai dengan indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2023, nilai Indeks Inovasi Daerah mulai tercatat sebesar **37,1**, yang menunjukkan mulai dilakukannya penginputan dan pendokumentasian inovasi daerah pada sistem penilaian inovasi daerah. Pada tahun 2024 nilai indeks inovasi daerah tercatat sebesar **35**, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2025 nilai Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi **44,2**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin aktif dalam mengembangkan dan mendokumentasikan inovasi pada berbagai sektor, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.

Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta daya saing daerah.

Grafik 3. 3 Tren Indeks Inovasi Daerah 2022–2025



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Analisis capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan maupun dengan melihat tren capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga dengan membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perlu dijelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan perencanaan strategis perangkat daerah. Pada tahun tersebut terjadi peralihan dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2029.

Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 baru ditetapkan pada tanggal 5 November 2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada sebagian besar tahun 2025 masih mengacu pada arah kebijakan dan perencanaan yang terdapat dalam Renstra periode sebelumnya. Namun demikian, indikator kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mulai menyesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra periode baru.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja pada tahun 2025 berada dalam masa penyesuaian antara dua dokumen perencanaan strategis. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja pada tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks masa transisi perencanaan strategis organisasi, dimana sebagian capaian kinerja masih dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang direncanakan pada periode Renstra sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 tetap dapat memberikan gambaran mengenai posisi capaian kinerja organisasi pada awal periode pelaksanaan Renstra yang baru.

1. Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Realisasi nilai AKIP komponen perencanaan kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 22,73. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025–2029, capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja telah berada pada arah yang tepat. Peningkatan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis, serta peningkatan kualitas penjabaran kinerja hingga ke tingkat perangkat daerah.

Capaian tersebut menjadi modal awal yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

2. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Realisasi nilai AKIP komponen pengukuran kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,10, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra Bapperida Tahun 2025–2029, capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengukuran kinerja organisasi telah berjalan secara progresif. Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh semakin baiknya proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja, peningkatan kualitas pelaporan

kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih terstruktur.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja di lingkungan Bapperida Kabupaten Nias Selatan telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah organisasi.

3. Indeks Inovasi Daerah

Realisasi Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 44,2. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025–2029, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan inovasi daerah telah menunjukkan hasil yang positif pada awal periode pelaksanaan Renstra yang baru. Hal ini mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi daerah sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan demikian, capaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa arah pengembangan inovasi daerah telah sejalan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis terhadap capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indikator kinerja organisasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja serta sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode perencanaan berikutnya.

1. Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Capaian nilai AKIP komponen perencanaan kinerja pada tahun 2025 sebesar **22,73** atau mencapai sekitar 99% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja perangkat

daerah telah berada pada kategori yang baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, khususnya dalam penyelarasan antara dokumen RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja perangkat daerah.
2. Adanya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan kapasitas aparatur perencana, baik melalui pembinaan maupun pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target secara optimal, antara lain:

1. Masih terdapat penetapan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.
2. Penjabaran kinerja pada beberapa perangkat daerah masih berorientasi pada program dan kegiatan, belum sepenuhnya berbasis pada hasil (outcome).
3. Keterkaitan antara rencana aksi dan indikator kinerja pada beberapa perangkat daerah masih perlu disempurnakan.

Sebagai upaya perbaikan, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatkan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam penyusunan indikator kinerja.
3. Memperkuat penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis pembangunan daerah.

2. Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Capaian nilai AKIP komponen pengukuran kinerja pada tahun 2025 sebesar **14,10**, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja dalam melakukan pemantauan capaian kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam melakukan pengukuran kinerja secara berkala.
3. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja yang dilakukan secara periodik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Dokumen indikator kinerja utama pada sebagian perangkat daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang jelas.
2. Validitas dan konsistensi data capaian kinerja pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.
3. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial masih perlu diperkuat.

Sebagai langkah perbaikan, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyusun pedoman pengukuran kinerja yang lebih jelas dan terstandar.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja perangkat daerah.
3. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan perencanaan kinerja.

3. Indeks Inovasi Daerah

Capaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 sebesar **44,2** menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
2. Adanya upaya penguatan dokumentasi dan pelaporan inovasi daerah.
3. Koordinasi yang lebih baik dalam penginputan data inovasi daerah pada sistem penilaian inovasi nasional.

Namun demikian, pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Belum tersedianya dokumentasi inovasi daerah yang sistematis dan terstandar, khususnya pada tahun 2022 sehingga nilai Indeks Inovasi Daerah belum dapat dihitung.
2. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah mengenai indikator penilaian inovasi daerah.
3. Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan dan replikasi inovasi daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Mendorong penguatan sistem dokumentasi inovasi daerah.
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait pengembangan inovasi.
3. Mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang dimiliki organisasi, baik berupa sumber daya manusia maupun anggaran, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Nias Selatan, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan, diketahui bahwa jumlah pegawai yang tersedia saat

ini masih berada di bawah kebutuhan ideal organisasi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Kebutuhan dan Kondisi Pegawai Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

Formasi Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai
Kepala	1	1
Sekretariat	14	7
Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	13	7
Bidang Perekonomian dan SDA	10	6
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	13	5
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13	6
Bidang Riset dan Inovasi	12	6

Berdasarkan tabel tersebut, total kebutuhan pegawai pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak **76 orang**, sedangkan jumlah pegawai yang tersedia saat ini sebanyak **38 orang**. Dengan demikian terdapat kekurangan pegawai sebanyak **38 orang** atau sekitar **50 persen dari kebutuhan ideal organisasi**.

Meskipun terdapat keterbatasan jumlah pegawai, capaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dimana sebagian besar indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara relatif efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia tersebut didukung oleh adanya pembagian tugas yang efektif antarbidang, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan, serta optimalisasi peran aparatur perencana dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Namun demikian, keterbatasan jumlah pegawai tersebut tetap menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan pegawai

sesuai dengan kebutuhan organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi aparatur perencanaan.

B. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, anggaran merupakan sumber daya penting yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan tingkat penggunaan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing indikator kinerja.

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22,95	22,73	99	1,469,447,356	1,312,147,640	11%
		Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja	12,55	14,10	112	570,406,196	552,281,100	3%
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	40	44,2	111	153,092,150	136,219,375	11%

Rumus perhitungan efisiensi :

$$Efisiensi = \left(1 - \frac{Realisasi Anggaran}{Pagu Anggaran} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- Pagu Anggaran = jumlah anggaran yang dialokasikan pada suatu program/kegiatan/indikator kinerja
- Realisasi Anggaran = jumlah anggaran yang benar-benar digunakan
- Efisiensi = menunjukkan persentase penghematan atau sisa anggaran dari pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum penggunaan anggaran pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, sementara penggunaan anggaran dapat dikendalikan secara optimal.

Indikator Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Indeks Inovasi Daerah bahkan menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Dengan demikian, secara keseluruhan penggunaan sumber daya anggaran pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat dinilai cukup efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah serta meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah, terdapat beberapa program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama Bapperida Kabupaten Nias Selatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah yang mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja. Melalui program ini dilakukan penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator program ini adalah Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah, yang dihitung dengan formula:

$$\text{ITKPD (\%)} = (\text{Bobot Akuntabilitas}) + (\text{Bobot Efisiensi}) + (\text{Bobot Pengelolaan BMD}) + (\text{Bobot Peningkatan Kapasitas SDM}) + (\text{Bobot Inovasi PD})$$

Keterangan :

Bobot Akuntabilitas = Sesuai skor nilai LAKIP

Bobot Efisiensi = Sesuai persentase realisasi anggaran

Bobot Pengelolaan BMD = 0 atau 10

Bobot Peningkatan Kapasitas SDM = 0 atau 10

Bobot Inovasi PD = 0 atau 10

Program ini didukung oleh kegiatan dan subkegiatan antara lain Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja melalui peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Indikator program berupa Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada masing-masing bidang pembangunan dihitung berdasarkan tingkat keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Renja Perangkat Daerah.

Penilaian dilakukan terhadap beberapa sub-indikator dengan menggunakan metode pembobotan.

$$\text{Persentase Keselarasan} = \frac{\text{Skor}_1 + \text{Skor}_2 + \text{Skor}_3 + \text{Skor}_4}{100} \times 100\%$$

Keterangan Skor :

- 1) Tingkat keterkaitan indikator sasaran Renja PD masing-masing bidang dengan sasaran RKPD
- 2) Ketersediaan tabel persandingan antara sasaran Renja PD masing-masing bidang dengan RKPD
- 3) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan Renja PD masing-masing bidang dengan RKPD

- 4) Ketersediaan tabel persandingan antara prioritas RKPD masing-masing bidang dengan program Renja PD

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi perencanaan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja melalui penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator program ini ada 2 yaitu :

1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD

Persentase ini di hitung berdasarkan penilaian terhadap beberapa sub-indikator keselarasan antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan menggunakan metode pembobotan, yang dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase Keselarasan} = \frac{Skor_1 + Skor_2 + Skor_3 + Skor_4}{100} \times 100\%$$

Keterangan Skor :

- 1) Tingkat keterkaitan indikator sasaran RKPD dengan sasaran RPJMD
- 2) Ketersediaan tabel perbandingan antara sasaran/indikator RKPD dengan RPJMD
- 3) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan RKPD dengan RPJMD
- 4) Ketersediaan tabel perbandingan antara prioritas RPJMD dengan program/kegiatan RKPD

2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dihitung berdasarkan tingkat keterkaitan antara sasaran, indikator, dan prioritas pembangunan yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD. Penilaian dilakukan melalui beberapa sub-indikator yang memiliki bobot tertentu. Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Keselarasan} = \frac{\text{Skor}_1 + \text{Skor}_2 + \text{Skor}_3 + \text{Skor}_4}{100} \times 100\%$$

Keterangan Skor :

- 1) Tingkat keterkaitan indikator sasaran Renstra PD dengan sasaran RPJMD
- 2) Ketersediaan tabel perbandingan antara sasaran/indikator RKPD dengan RPJMD
- 3) Tingkat keselarasan prioritas pembangunan Renstra PD dengan RPJMD
- 4) Ketersediaan tabel perbandingan antara prioritas RPJMD dengan program Renstra PD

Program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, serta Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indikator Indeks Inovasi Daerah melalui pengembangan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator program Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- **Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan** adalah jumlah rekomendasi hasil penelitian atau kajian yang telah digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan atau program pembangunan daerah.
- **Jumlah total rekomendasi** adalah seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Adapun rincian capaian masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut disajikan secara lebih lengkap pada lampiran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Bapperida Kabupaten Nias Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp 2.192.945.702,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah)** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp 2.000.648.115,- (dua milyar enam ratus empat puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah)** atau mencapai **91,23%** dari total anggaran yang dialokasikan.

Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Nias Selatan secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta pengembangan riset dan inovasi daerah.

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,047,527,546	890,510,991	85.01%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,039,500	33,039,500	100.00%
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,328,000	6,328,000	100.00%
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,813,000	5,813,000	100.00%
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,642,000	5,642,000	100.00%
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3,750,000	3,750,000	100.00%
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,750,000	3,750,000	100.00%
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,781,500	3,781,500	100.00%
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,975,000	3,975,000	100.00%
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147,901,500	140,631,500	95.08%
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129,360,000	122,090,000	94.38%
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,379,000	5,379,000	100.00%
5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	3,776,500	3,776,500	100.00%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,676,000	5,676,000	100.00%
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,710,000	3,710,000	100.00%
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7,627,250	7,600,250	99.65%
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,942,000	3,942,000	100.00%
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,685,250	3,658,250	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,460,000	53,232,270	58.20%
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,460,000	53,232,270	58.20%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	496,249,296	426,342,876	85.91%
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,182,310	12,175,000	99.94%
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,225,651	40,315,000	95.48%
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77,313,335	77,290,455	99.97%
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,005,000	40,007,000	88.89%
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,000,000	-	0.00%
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000	5,949,000	99.15%
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,523,000	250,606,421	83.67%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180,570,000	155,339,966	86.03%
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,230,000	4,000,000	94.56%
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000	12,119,966	80.80%
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161,340,000	139,220,000	86.29%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,680,000	74,324,629	81.96%
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,420,000	49,309,629	75.37%
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,260,000	25,015,000	99.03%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	570,406,196	552,281,100	96.82%
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	494,801,000	476,872,600	96.38%
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	114,018,000	112,160,450	98.37%
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4,999,000	4,999,000	100.00%
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	64,686,000	62,536,000	96.68%
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	27,308,000	27,308,000	100.00%
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	49,358,000	44,058,000	89.26%
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	39,648,000	39,628,000	99.95%
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	194,784,000	186,183,150	95.58%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	33,676,500	33,676,500	100.00%
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5,001,000	5,001,000	100.00%
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	17,674,500	17,674,500	100.00%
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11,001,000	11,001,000	100.00%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	41,928,696	41,732,000	99.53%
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	24,135,696	23,939,000	99.19%
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	17,793,000	17,793,000	100.00%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	421,919,810	421,636,649	99.93%
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	136,425,900	136,371,939	99.96%
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6,803,900	6,803,700	100.00%
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14,000,000	14,000,000	100.00%
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,981,400	4,981,400	100.00%
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4,984,650	4,984,650	100.00%
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38,770,750	38,770,750	100.00%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13,947,000	13,947,000	100.00%
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12,451,000	12,451,000	100.00%
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40,487,200	40,433,439	99.87%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	147,624,910	147,541,310	99.94%
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,122,000	11,122,000	100.00%
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	17,257,500	17,257,500	100.00%
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10,792,000	10,792,000	100.00%
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	46,252,000	46,208,400	99.91%
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,123,000	11,123,000	100.00%
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17,256,500	17,256,500	100.00%
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10,779,500	10,779,500	100.00%
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	23,042,410	23,002,410	99.83%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	137,869,000	137,723,400	99.89%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6,104,600	6,098,600	99.90%
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	21,429,100	21,422,750	99.97%
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5,215,400	5,214,500	99.98%
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	79,385,500	79,264,050	99.85%
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,167,750	3,167,500	99.99%
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14,655,400	14,649,250	99.96%
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3,456,200	3,453,200	99.91%
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4,455,050	4,453,550	99.97%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	153,092,150	136,219,375	88.98%
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	109,925,500	109,160,125	99.30%
5	05	02	2.01	0012	Pengelola Data Kelitbangan dan Peraturan	15,000,000	14,958,000	99.72%
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	94,925,500	94,202,125	99.24%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	20,963,150	4,871,400	23.24%
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pekerbunan dan Pangan	20,963,150	4,871,400	23.24%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	22,203,500	22,187,850	99.93%

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	14,420,250	14,411,800	99.94%
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	7,783,250	7,776,050	99.91%
TOTAL						2,192,945,702	2,000,648,115	91.23%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara umum telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Capaian indikator kinerja utama menunjukkan bahwa kinerja Bapperida dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penguatan riset serta inovasi daerah telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan perencanaan strategis organisasi serta dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 mencapai 91,23% dari total anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kinerja organisasi ke depan, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur perencana, penguatan sistem perencanaan berbasis data dan teknologi informasi, serta peningkatan integrasi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah, analisis kebijakan, dan pengelolaan data pembangunan.

2. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan teknologi informasi guna mendukung proses perencanaan yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis bukti.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.
5. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II;
2. Rencana Aksi Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perubahan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
4. Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bapperida Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
5. Foto pelaksanaan kegiatan Bapperida Kabupaten Nias Selatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Saonigehe KM. 3,5, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara
Kode Pos 22865

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP,.M.Ec.Dev**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Nias Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sokhiatulo Laia**
Jabatan : Bupati Nias Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 10 November 2025

Pihak Kedua,

Sokhiatulo Laia

Pihak Pertama

Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP,.M.Ec.Dev
Pembina Teknis
NIP. 19830826 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22.95 Poin
		Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12.55 Poin
2	Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	40.00 Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.047.527.546	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 570.406.196	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 421.919.810	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 153.092.150	APBD
Jumlah		Rp 2.192.945.702	

Teluk Dalam, 10 November 2025

Pihak Kedua,

 Sokhiatulo Laia

Pihak Pertama

 Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP, M.Ec.Dev
 Pembina Tk
 NIP. 19830826 200112 1 002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSB)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh penguatan riset dan inovasi untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan	Meningkatnya kualitas penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	35,50	Poin									Menyempurnakan perencanaan kinerja, sasaran, indikator strategis setiap perangkat daerah, memastikan RKU Perda dan Perangkat Daerah dapat dicapai dengan formulasi yang tepat				36	
		Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Persentase implementasi riset dan inovasi	70	%									Menginventarisasi hasil riset lokal, menstokronkan hasil riset dengan kebutuhan OPD, menentukan OPD pengguna hasil riset, menyusun rencana pilot project implementasi, mengukur berapa persen riset yang benar-benar diadopsi dan dampaknya				20	
						Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	100	%					Melakukan penilaian mandiri terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja, mengidentifikasi area lemah dan menyusun rencana peningkatan kinerja secara bertahap, memastikan program dan anggaran OPD berbasis data dan hasil evaluasi, mempublikasikan rencana kerja, realisasi anggaran, dan capaian kinerja secara terbuka	25%	25%	25%	25%	
										Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	90 (A)	Predikat	Memastikan sasaran, indikator, dan target kinerja di Renstra dan Renja konsisten dan SMART.		90			
										Tersedianya Dokumen/Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD		1	2		
										Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1	
										Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun perubahan Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD		1			
										Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1	
										Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD		1			
										Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Aktivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Aktivitas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Aktivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Aktivitas Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	Menyusun PK dan perubahannya, menyusun rencana aksi tahunan untuk pencapaian kinerja, menyusun dan menginput dokumen LKRP pada web integritas		2			
										Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Menyusun evaluasi kinerja tahunan I,II,III dan IV		1	1	1	1
										Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96	%	Memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target	25	25	25	21	
										Tersedianya Gap dan Tuntutan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gap dan Tuntutan ASN	30	Org/bn	Melakukan pembayaran gap dan tuntutan ASN setiap bulan	30	30	30	30	
										Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyajikan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CAJ/K		1			

No.	Tupai	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemenuhan dan Tidak Lemah Pemenuhan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemenuhan dan Tidak Lemah Pemenuhan	1	Dok	Menyediakan bahan tanggapan hasil pemeriksaan inspektoral dan BPK		1		
										Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	Menyediakan LRA, LPE, LO, neraca, RKU Pengakuan, kartu dan rekap persediaan, rekap sopir, register SPP, GPM dan SP2D, SPJ fungsional dan bukti pembayaran pajak bulanan	3	3	3	3
										Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	Menyusun prognosis realisasi anggaran bahan sebelumnya				1
										Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase yang telah tercatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah	100	%	Melakukan pendataan barang milik daerah		50		50
										Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	Menyusun rencana barang kebutuhan perangkat daerah		1		
										Tersedianya Laporan Penyesuaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyesuaian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun laporan barang milik daerah pada SKPD				1
										Meningkatnya Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi	10	Org	Menyusun rencana pelatihan tahunan OPD			10	
										Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Org	Menghadiri dan mengikuti penewaran diklat baik formal maupun non formal		10		
										Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Tingkat efektivitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	Memastikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kinerja memadai	25%	25%	25%	25%
										Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	4		
										Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	Paket	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	6	6		
										Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan mekasin serta minuman rapat	10	10	10	17
										Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	3	3	3	
										Tersedianya Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	Menyediakan bahan bacaan berupa koran dan majalah	3	3	3	3
										Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	Memfasilitasi setiap tamu yang berkunjung	3	3	3	3
										Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	Lap	Melakukan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	50	50	70	70
										Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	100	%	Memastikan ketersediaan layanan penyedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%
										Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520	Lap	Membuat laporan penggunaan materi dan benda pos lainnya	130	130	130	130
										Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran biaya internet setiap bulan (Indihome)	3	3	3	3

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran jasa tenaga kerja lepas (Supir, Jaga Malam, Kabinir dan Operator)	3	3	3	3
										Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis	100	%	Melakukan pemeliharaan barang milik daerah	25	25	25	25
										Tersedianya Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pagornya	8	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	2	2
										Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Melakukan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1			
										Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68	Unit	Memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	17	17	17	17
						Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	%					Memastikan seluruh arah kebijakan, prioritas, dan indikator sasaran tersedia dan terukur, mewajibkan seluruh OPD menyusun Renja mengacu langsung pada target RPJMD, menggunakan fitur pengendalian perencanaan dalam SIPD untuk menjaga konsistensi antar dokumen, menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan tahunan dengan RPJMD	50%	50%		
						Meningkatnya keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	%					Memastikan seluruh OPD memahami visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD, mewajibkan seluruh Renstra OPD memuat turunan langsung dari sasaran dan indikator RPJMD, melakukan pendampingan penyusunan Renja melalui klinik perencanaan	50%	50%		
										Meningkatnya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah	Tingkat ketepatan waktu dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	Menyelenggarakan forum perencanaan secara berjenjang dan tematik, menyusun rencana pembangunan partisipatif dan kolaboratif	30	50	28	
										Tersedianya Analisis Kondisi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Termasuk Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	1	1		
										Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	5	Dok	Menelaah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (dok RKPD, RKPD PROV, RPJPD, RPJMD, RTHW)		5		
										Tersedianya Forum Peringkat Daerah/Unitas	Jumlah Berta Acara Forum Peringkat Daerah/Unitas Peringkat	2	BA	Melaksanakan konsultasi publik rencana awal RKPD	1	1		
										Tersedianya Forum Peringkat Daerah/Unitas	Jumlah Berta Acara Forum Peringkat Daerah/Unitas Peringkat	35	BA	Melaksanakan forum SKPD, lintas SKPD		35		
										Tersedianya Monev	Jumlah Berta Acara Monev	2	BA	Menyelenggarakan monev RPJPD Kabupaten/Kota	1	1		
										Tersedianya Usulan Usulan yang Telah Terseleksi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terseleksi oleh Kecamatan	461	Usulan	Memverifikasi usulan pembangunan dari desa	461			
										Ditutupkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditutupkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	3	Dok	Menyusun dan menetapkan dokumen RKPD dan penutupannya, serta menetapkan dokumen RPJMD 2025-2029	1	1	1	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKSKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Meningkatnya ketersediaan dan informasi yang akurat. Terpenuhinya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data pembangunan yang tersedia Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100 % 3 Dok		Melakukan FGD pengumpulan data dan informasi Pemerintah Daerah Menyusun analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah	50%	50%		
										Terbnyanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemertabatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibare dalam Pemertabatan Data dan Informasi	63 Orang		Melakukan sosialisasi penginputan Rangka dalam aplikasi SIPD-R			1	
										Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Utterdian	1 Buku		Mengumpulkan data-data berupa gambaran umum kondisi daerah dan data capaian pembangunan daerah Kabupaten/Kota	1			
										Meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90 %		Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah	10	20	50	20
										Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap		Meningkatkan jumlah laporan hasil pengendalian sesuai dengan target yang ditetapkan memuatkan laporan yang disertai berkeselutan, akurat, dan seluas dengan ketentuan meningkatkan efektivitas pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	1			
										Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Lap		Melakukan monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah	2	1	1	1
										Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan	Persentase kesetaraan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	50%	50%		
										Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase kesetaraan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %		Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	50%	50%		
										Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan	Persentase kesetaraan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	50%	50%		
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	100 %		Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/renja dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melakukan koreksi dan validasi	50	50		
										Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 Dok		Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang di koordine penyusunannya	21	21		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSG)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		21	21	
										Terkelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan		21	21	
										Selenggaranya Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Rencana/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan		21	21	
										Terkelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia yang di koordin penyusunannya		21	21	
										Terselenggaranya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		21	21	
										Terkelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		21	21	
										Selenggaranya Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Rencana/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		21	21	
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	
										Terkelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang di koordin penyusunannya		21	21	
										Terselenggaranya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	
										Terkelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana/Renja Bidang Perekonomian	42	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	
										Selenggaranya Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Rencana/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSKG)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Terkondisinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Oke/terselesaikan Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang di koordinir penyusunannya		21	21	
										Terselesaikannya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Auditem Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		21	21	
										Terlaksanainya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		21	21	
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		21	21	
										Mengikutnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang perkenovolan dan SDA serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	
										Terkondisinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Oke/terselesaikan Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang di koordinir penyusunannya		21	21	
										Terselesaikannya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Auditem Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	42	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		21	21	
										Terlaksanainya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	42	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		21	21	
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur		21	21	
										Terlaksanainya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Oke/terselesaikan Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunannya		21	21	
										Terselesaikannya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Auditem Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	

No	Tugasan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)				
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV	
										Tersedianya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Aspek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	21	21			
										Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	21	21			
										Sinkronisasi Rencana/Rang dengan RKPDR/PJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Rang dengan RKPDR/PJMD pada Bidang Kewilayahan	42	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Rencana/Rang perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	21	21			
						Meningkatnya pemanfaatan riset keltibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	100	%						Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan secara sistematis dan berbasis data				Rapp
						Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	100	%						Melakukan Bappeda, CPO teknis, dan mitra akademis untuk menyusun kajian berbasis data dan riset lapangan				Rapp
						Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	100	%						Memastikan permasalahan strategis daerah diselesaikan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based), yang tertuang dalam kebijakan dan program pembangunan daerah				Rapp
						Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	100	%						Meningkatkan kuantitas dan kualitas dukungan terhadap kegiatan litbang melalui pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta SDM di daerah				Rapp
										Meningkatnya laporan hasil litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3	Dok	Menyusun kajian yang komprehensif, relevan, dan berkualitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, guna mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan	1	1	1		
										Tersedianya Data Keltibangan dan Peraturan yang Terkoreksi dengan Baik	Jumlah Data Keltibangan dan Peraturan yang Terkoreksi dengan Baik	1	Lap	Mengelola data keltibangan (penelitian dan pengembangan) dan peraturan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis teknologi agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemangku pemerintahan				1	
										Tersedianya Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2	Lap	Meningkatkan jumlah dan kualitas laporan hasil pelaksanaan fasilitas dan evaluasi terkait kegiatan data dan pengkajian peraturan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti	1	1			
										Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Dok	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penafsiran untuk menyimpulkan dan menyusun penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		1			
										Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Lap	Melakukan penelitian dan pengembangan Pertanian Umum		1			
										Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi	Persentase unit kerja yang menerapkan inovasi teknologi dari total unit yang ada	100	%	Melakukan Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100		

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	1	Lap	Menyusun laporan hasil kelibangan				1



PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKKGK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22,93	Poin									Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang logis dan selaras, dengan indikator dan target yang SMART serta berbasis hasil, memaparkan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan validasi dan revisi internal secara berkala				22,93
			Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12,55	Poin									Memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, menggunakan indikator yang terukur dan relevan dan dibukung data yang andal				12,55
		Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	40	Poin									Mengimplementasi hasil riset lokal, memstokkan hasil riset dengan kebutuhan OPD, menentukan OPD pengguna hasil riset, menyusun rencana pilot project implementasi, mengukur berapa persen riset yang benar-benar diadopsi dan dampaknya				40
						Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Indeks tata kelola Perangkat Daerah	83	%					Melakukan penilaian mandiri terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja, mengidentifikasi area lemah dan menyusun rencana peningkatan kinerja secara bertahap, memastikan program dan anggaran OPD berbasis data dan hasil evaluasi, mempublikasikan rencana kerja, realisasi anggaran, dan capaian kinerja secara terbuka	20	20	20	20
										Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakiip	62 (6)	Predik- si	Memastikan sasaran, indikator, dan target kinerja di Rortra dan Renga konsisten dan SMART.			62	
										Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD	1	2		
										Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasi dan menyusun Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1
										Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasi dan menyusun perubahan Dokumen RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD	1			
										Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD				1
										Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	Mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran kas (RAK) dokumen perubahan DPA-SKPD melalui aplikasi SIPD	1			
										Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	Menyusun PK dan penjabarannya, menyusun rencana aksi tahunan untuk pencapaian kinerja, menyusun dan menginput dokumen LKIP pada web mnpn	2			
										Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	Menyusun evaluasi kerja triwulan I, II, III dan IV	2	1	1	1
										Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96	%	Menyusun jadwal kegiatan kerja awal tahun dan memastikan anggaran sesuai kebutuhan riil, memantau realisasi setiap bulan, mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan cepat seperti revisi jadwal atau percepatan administrasi	25	25	25	21

No	Tupuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KIP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAH)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Org/Bl	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN setiap bulan	33	33	33	33
										Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan GALK	1			
										Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkuaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkuaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyapkan bahan tanggapan hasil pemeriksaan inspektoral dan BPK	1			
										Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO, neraca, BKU Pengeluaran, kartu dan rekap persediaan rekap spsd, register SPP, SPM dan GPZD SPJ fungsional dan bab pembayaran pajak bulanan	3	3	3	3
										Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dok	Menyusun prognosi realisasi anggaran bahan sebelumnya	1			1
										Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase yang telah tercatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah	100	%	Melakukan pendataan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak di tiap unit kerja, memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan, berfa acara, dan nilai aset, memasukkan data aset ke aplikasi BMD sesuai standar		50		50
										Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	Menyusun rencana barang kebutuhan perangkat daerah	1			
										Tertakutannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun laporan barang milik daerah pada SKPD				1
										Meningkatnya Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapat Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai Tugas dan Fungsi	100	%	Melakukan penataan kebutuhan kompetensi pegawai, menyusun rencana pelatihan berbasis gap kompetensi, serta mendaslatasi pegawai mengikuti diklat, bintek, dan kegiatan pengembangan lainnya sesuai tugas dan fungsinya		50		50
										Tertakutannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan	10	Org	Menghadiri dan mengikut penanren diklat baik formal maupun non formal		10		
										Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Tingkat efektivitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	Memastikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kinerja memadai	25	25	25	25
										Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4	5	
										Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	5	5	5	
										Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44	Paket	Menyediakan bahan logistik kantor berupa ATK dan makana serta murusai rapat	10	10	10	14
										Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	3	3	3	1
										Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dok	Menyediakan bahan bacaan berupa koran dan majalah	3	3	3	3
										Tertakutannya Fasilitas Kumpulan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kumpulan Tamu	12	Lap	Mendafilitasi setiap tamu yang berkunjung	3	3	3	3
										Tertakutannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Lap	Melakukan rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun luar daerah	50	50	100	100

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)								
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV					
										Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar operasional	100	%	Memastikan ketersediaan layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	25	25	25	25					
										Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	423	Lap	Membuat laporan penggunaan materi dan benda pos lainnya	100	100	100	123					
										Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran biaya internet setiap bulan (indohome)	3	3	3	3					
										Tersedianya Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran jasa tenaga hewan lepas (Supir, Jaga Malam, Ketentuhan dan Operator)	3	3	3	3					
										Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis	100	%	Melakukan pemeliharaan barang milik daerah	25	25	25	25					
										Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	Memelihara dan melakukan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	2	2	2					
										Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	26	Unit	Memelihara sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7	7	7	7					
										Meningkatnya kesetaraan RPJMD dengan RKPD	Persentase kesetaraan RPJMD dengan RKPD	94	%						Memastikan seluruh arah kebijakan, prioritas, dan indikator sasaran tersedia dan terukur, mewajibkan seluruh OPD menyusun Renja mengacu langsung pada target RPJMD, menggunakan flur pengendalian perencanaan dalam OPD untuk menjaga konsistensi antar dokumen, menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan tahunan			50	44
										Meningkatnya kesetaraan RPJMD dengan RENSTRA PD	Persentase kesetaraan RPJMD dengan Renstra PD	100	%						Memastikan seluruh OPD memahami visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD, mewajibkan seluruh Renstra OPD memuat tahunan langsung dari sasaran dan indikator RPJMD, melakukan pendampingan penyusunan Renstra melalui klinik			50	50
														Meningkatnya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemandku	Tingkat ketepatan waktu dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%	Menyelenggarakan forum perencanaan secara berjenjang dan tematik, menyusun rencana pembangunan partisipatif dan kolaboratif	30	30	20		
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sinus Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Dok	Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1	1													
				Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5	Dok	Meneviala dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya (dok RKP, RKPD, PLOV, RPJPD, RPJMD, RTRW)			6												
				Tersedianya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	BA	Melakukan konsultasi publik rancangan awal RKPD	1	1													
				Tersedianya Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Lintas Peringkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Peringkat	36	BA	Melakukan forum SKPD/Lintas SKPD			36												
				Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	BA	Menyelenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	1	1													

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (RPI)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/KSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Tersedianya Usulan Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	400	Usulan	Memverifikasi usulan pembangunan dari desa	400			
										Dibetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dok	Menyusun dan menetapkan dokumen RKPD dan perubahannya, serta menetapkan dokumen RPJMD 2025-2029	1	1	1	
										Meningkatnya ketersediaan dan informasi yang akurat	Persentase data pembangunan yang tersedia	100	%	Melakukan FGD pengumpulan data dan informasi Pemerintah Daerah		50	50	
										Teriputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Gensu Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dok	Menyusun analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3			
										Terdinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63	Orang	Melakukan sosialisasi penggunaan Renja ke dalam aplikasi SIPD-R		63		
										Terusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	Mengumpulkan data data bentuk gambaran umum kondisi daerah dan data capaian pembangunan daerah Kabupaten/Kota		1		
										Meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90	%	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah	10	20	30	30
										Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap	Meningkatkan jumlah laporan hasil pengendalian sesuai dengan target yang ditetapkan memastikan laporan yang diberikan berkualitas, akurat, dan sesuai dengan ketentuan, meningkatkan efektivitas pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1			
										Terusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Lap	Melakukan monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2	1	1	1
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			50	50
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA			50	50
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%					Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan			50	50
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melakukan koreksi dan validasi			50	50
										Terusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KIP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK/KSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAH)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Terdapatnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	21	21	21	
										Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	21	21	21	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	21	21	21	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	
										Terdapatnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	21	21	21	
										Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	21	21	21	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	21	21	21	
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Mencetak kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	
										Terdapatnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	21	21	21	
										Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	21	21	21	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKKKBK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAI)			
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan	21	21	21	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	21	21	21	
										Terkelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA	21	21	21	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	21	21	21	
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	21	21	21	
										Terkelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	21	21	21	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	21	21	21	
										Terkelaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunannya	21	21	21	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	21	21	21	

LAPORAN MONITORING EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I s.d IV TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai		
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	22,96	Poin									Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang lugas dan jelas, dengan indikator dan target yang SMART serta berbasis hasil, memastikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan validasi dan review internal secara berkala				22,96	22,96					22,73	22,73		✓
			Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	12,66	Poin									Memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, menggunakan indikator yang terukur dan relevan dan didukung data yang andal				12,66	12,66					14,10	14,10		✓
		Meningkatnya hasil riset dan inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	40	Poin									Menginventarisasi hasil riset lokal, memprioritaskan hasil riset dengan kebutuhan OPD, menentukan OPD pengguna hasil riset, menyusun rencana pilot project implementasi, mengukur berapa persen riset yang benar-benar diadopsi dan dampaknya				40	40					44,22	44,22		✓
														Meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja yang tepat waktu, monitoring realisasi anggaran, pengujian pengelolaan Barang Milik Daerah melalui pencatatan, inventarisasi, dan rekonsiliasi aset secara berkala; peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, binafex; serta pengembangan inovasi perangkat daerah yang mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola	20	20	20	23	63	11	24	37,5	17,5	80,00		✓	
														Memastikan sasaran, indikator, dan target kinerja di Renstra dan Renja konsisten dan SMART			62		62								

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKGSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai		
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			I	II		III	IV	I	II		III	IV	Ya	Tidak				
										Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO dan rekonsiliasi aset sebagai bahan penyusunan CALK	1					1	1				1	✓	
										Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Menyapkan bahan tanggapan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK	1					1	1				1	✓	
										Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Lap	Menyapkan LRA, LPE, LO, neraca, BKU, Pengeluaran, kartu dan rekap persediaan, rekap lapd, register SFP,SPM dan SP2D, SPJ fungsional, dan buku pembayaran pajak bulanan	3	3	3	3	12	6	3	3	3	12	✓		
										Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dok	Menyusun prognosis realisasi anggaran tahun sebelumnya	1		1		2		1	1		2	✓		
										Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Persentase yang telah tercatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah	100	%	Melakukan pendataan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak di tiap unit kerja, memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan, bukti acara, dan nilai aset, memasukkan data aset ke aplikasi BMD sesuai standar	50		50		100		75	25		100	✓		
										Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	Menyusun rencana barang kebutuhan perangkat daerah	1				1	1				1	✓		
										Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Menyusun laporan barang milik daerah pada SKPD			1		1	1				1	✓		
										Meningkatnya Fasilitas dan Pengembangan Kompetensi sesuai																	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KIP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKK/IKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIMULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	423	Lap	Membuat laporan penggunaan materi dan benda pos lainnya	100	100	100	123	423		100	250	50	400		✓
										Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembayaran biaya internet setiap bulan (Indihome)	3	3	3	3	12		6	3	3	12	✓	
										Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	Membuat laporan pembastaran jasa tenaga harian lepas (Sapar, Jaga Malam, Koberstuan dan Operator)	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	✓	
										Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis	100	%	Melakukan pemeliharaan barang milik daerah	26	26	26	26	100		30	43	27	100	✓	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Terwujudnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dok	Menyusun analisis data untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3				3				3	✓		
										Terbentuknya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63	Orang	Melakukan sosialisasi penginputan Rangka dalam aplikasi SPDR	63				63				63	✓		
										Terwujudnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Disajikan	1	Buku	Mengumpulkan data-data berupa gambaran umum kondisi daerah dan data capaian pembangunan daerah Kabupaten/Kota	1				1				1	✓		
										Meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	90	%	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah	10	20	30	30	90	13.96	19.97	20.45	30.83	95.21		✓
										Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap	Meningkatkan jumlah laporan hasil pengendalian sesuai dengan target yang ditetapkan, memastikan laporan yang dihasilkan berkualitas, akurat, dan sesuai dengan ketentuan, meningkatkan efektivitas pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1				1				1	✓		
										Terwujudnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Lap	Melakukan monitoring dan menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah	2	1	1	1	5	3	1	1	6	✓		
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%						Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	25	50	25	100		75	25	100	✓		
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%						Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	25	50	25	100		75	25	100	✓		
						Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%						Mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	25	50	25	100		75	25	100	✓		
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	100		75	25	100	✓			
										Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJMD, RPJMD dan RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJMD, RPJMD dan RPJMD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan												

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	42	Dok	Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan manusia yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkelompoknya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RPJDRP, JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJDRP, JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang pembangunan dan SDA yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang pembangunan dan SDA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA serta melakukan koreksi dan validasi			50	50	100			75	25	100	✓	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkelompoknya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	63	Lap	Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RPJDRP, JMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJDRP, JMD pada Bidang Perekonomian	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkelompoknya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan															

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (KP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian		Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV	Ya	Tidak		
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melakukan koreksi dan validasi			50	50	100			75	25	100	✓		
										Terkendalanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disusun	63	Dok	Mengajukan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Terselenggaranya Peringkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Terkendalanya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RPJPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Terkendalanya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disusun	63	Dok	Mengajukan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Terselenggaranya Peringkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Terkendalanya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓		
										Sinkronnya Renstra/Renja dengan RPJPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓		
						Meningkatnya pemanfaatan riset kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	100	%						Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan secara sistematis dan berbasis data				100	100		50	50	100	✓		
										Meningkatnya laporan hasil bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3	L														

No	Tupuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSGK)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Renja dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melakukan koreksi dan validasi		50	50	100			75	25	100	✓		
										Terselangnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-RPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disinkronkan (RP-RPD, RP-JMD dan RKPD)	63	Dok	Mengajukan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terselangnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Akreditasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terselangnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RP-RPD/RPD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RP-RPD/RPD pada Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terselangnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP-RPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disinkronkan (RP-RPD, RP-JMD dan RKPD)	63	Dok	Mengajukan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terselangnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Akreditasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terselangnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RP-RPD/RPD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RP-RPD/RPD pada Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	
						Meningkatnya pemanfaatan hasil keltbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	100	%						Menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan secara sistematis dan berbasis data			100	100			50	50	100	✓	
										Meningkatnya laporan hasil bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3	Lap	Menyusun kajian yang komprehensif, relevan, dan berkualitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan peng												

No.	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIMULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIMULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			I	II		III	IV	I	II		III	IV	Ya	Tidak			
										Meningkatnya persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen perencanaan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	Menetapkan kalender kerja penyusunan dokumen Renstra/Ranja dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melakukan koreksi dan validasi			50	50	100			75	25	100	✓	
										Terkaitnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disetujui Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang di koordin penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkaitnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkaitnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Ranja Bidang Infrastruktur	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronnya Renstra/Ranja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ranja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Ranja perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkaitnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disetujui Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63	Dok	Mengarsipkan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordin penyusunannya		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkaitnya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Terkaitnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	63	Lap	Melakukan dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	
										Sinkronnya Renstra/Ranja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ranja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	63	Lap	Membuat laporan hasil sinkronisasi Renstra/Ranja perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		21	21	21	63			42	21	63	✓	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target		Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target		Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (IKKSKG)	Target		RENCANA AKSI	TARGET PELAKSANAAN (TRIWULAN)				Total Target	CAPAIAN (TRIWULAN)				Total Capaian	Tercapai	
				Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan			Target Akhir	Satuan		I	II	III	IV		I	II	III	IV		Ya	Tidak
										Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisan, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisan, Perkebunan dan Pangan	1	Dok	Melaksanakan penelitian dan pengembangan Partisan, Perkebunan dan Pangan				1	1				1	1	√	
										Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi	Persentase unit kerja yang menerapkan inovasi teknologi dari total unit yang ada	100	%	Melakukan identifikasi potensi inovasi teknologi di setiap unit kerja, menyusun rencana implementasi, serta mendorong adopsi teknologi melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan inovasi.		100			100				100	√		
										Terlaksananya Diseminasi Jema, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jema, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovasi	1	Lap	Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi		1			1				1	1	√	
										Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelangkaan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelangkaan	1	Lap	Menyusun laporan hasil kelangkaan		1			1				1	1	√	



 Telukgading, 5 Januari 2026
 Hapriyus, Bupati Nias Selatan
 Sudat Saras, Sekretaris, SSTP, M.Ed, Dev
 Nomor Telp 0361 3030526 2001 2100



Kegiatan BIMTEK Pohon Kinerja, 05 s.d 07 Februari 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kegiatan Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026, 17 Januari 2025